BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak pasca perang dunia kedua yang kemudian disusul dengan berakhirnya perang dingin yang disimbolkan robohnya tembok Berlin tahun 1989 dan runtuhnya negara adidaya Uni Soviet sebagai pesaing Amerika Serikat, telah mengubah cara pandang dunia politik internasional yang mulanya terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) menjadi pada isu-isu *low politics* (hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup dan terorisme), sehingga masyarakat dunia pun makin mempunyai harapan besar akan datangnya perdamaian dunia yang abadi. Hubungan Internasional diwarnai dengan isu-isu yang konvensional dan non konvensional, lalu kemudian beralih kepada isu *high politics* dan *low politics* diantara beberapa pembahasan dalam hubungan internasional tersebut kemudian terdapatlah kejadian perang dan damai, isu perang dan damai sejatinya sudah ada sejak terbentuknya peradaban umat manusia, zaman dahulu hingga sekarang. Isu militer sudah ada sejak zaman dahulu dan perkembangannya hingga kini sangat signifikan. Di dalam studi hubungan internasional selalu ditunjukan oleh beberapa aktivitas yang sangat beraneka ragam contohnya ialah seperti perang, bantuan kemanusiaan dan pertahanan keamanan.

Melalui perkembangan dunia yang pesat telah menjadikan dampak yang dahsyat dalam hubungan internasional khususnya dalam hubungan pertahanan

negara dan ekonomi internasional guna menjaga stabilitas negara. Perkembangan ini mampu menciptakan pergaulan antar bangsa menjadi sangat terbuka. Sangatlah tidak mungkin bagi suatu negara yang benar-benar dapat mandiri atau berdiri sendiri tapi satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi.

Fenomena saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antar masalah memang telah terlihat dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerja sama regional baik berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang semakin meluas. Sehingga integrasi ekonomi regional, integrasi ekonomi global dan integrasi Pertahanan merupakan fenomena yang diterima sebagai bentuk kerjasama internasional bagi setiap negara bangsa. Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda, namun kebanyakan interaksi kerjasama terjadi secara langsung di antara dua negara (Simamora, 2013 : 1).

Kerjasama antar negara memiliki berbagai dimensi atau jenisnya, yang paling utama adalah untuk menjaga kepentingan nasional suatu negara dalam kancah global agar tetap terjaga dan pada akhirnya kepentingan nasional tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh suatu negara tertentu. Walaupun di sisi lain apabila tujuan nasionalnya tidak dapat tercapai, berbagai kemungkinan akan terjadi mulai dari ketegangan sampai kepada konflik atau lebih tinggi eskalasinya adalah perang.

Pada era modern, dikembangkan suatu kerjasama antar dua negara atau lebih atas nama kepentingan nasional masing-masing, yaitu apa yang dimaksudkan dengan kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Kedua

kerjasama tersebut berkembang sangat pesat, kerjasama beberapa negara terhimpun dalam suatu asosiasi atau Persatuan Bangsa-Bangsa, seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN dan untuk Kerjasama Pertahanannya disebut dengan ADMM atau *ASEAN defence Ministers Meeting, ARF* dan untuk Kerjasama Pertahanan Misalnya ada *ARF Head Of Defence Universities College Institutes Meeting (ARF HDUCIM),G7,G20* dan berbagai bentuk kerjasama multilateral lainnya, seperti Pakta Pertahanan. Pada dasarnya anggota yang terhimpun dalam asosiasi atau persatuan tersebut memiliki tujuan atau kepentingan yang sama, misalnya negara-negara yang terhimpun dalam PBB dan ASEAN (Supriyatno, 2014 : 136).

Demikian halnya kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia-Rusia yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara. Hubungan diplomatik antara Indonesia-Uni Soviet (sekarang Rusia) sudah terjalin sejak tahun 1950, pada saat pemerintahan Presiden Soekarno. Pada akhir 1950-an, Indonesia berupaya meningkatkan perekonomian dan melakukan reformasi dan modernisasi angkatan bersenjatanya. Saat itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal AH Nasution datang ke Amerika Serikat (AS) membawa proposal agar mendapat bantuan mereformasi angkatan bersenjata Indonesia. Namun AS menolak memberi bantuan persenjataan bagi Indonesia karena khawatir akan dipergunakan untuk berperang melawan sekutu AS di Organisasi Traktat Atlantik Utara (NATO), yaitu Belanda. Mendapat penolakan dari AS, Indonesia kemudian berpaling ke Uni Soviet. Dukungan Uni Soviet membuat Indonesia mampu mengembangkan teknologi dan pengetahuannya. Uni Soviet

banyak memasok peralatan militer kepada Indonesia, mulai dari tank, kapal perang, dan pesawat tempur dari berbagai jenis. Tidak hanya memasok peralatan militer, Uni Soviet juga memberikan pelatihan teknis kepada tentara dan jenderal asal Indonesia di akademi militer di Moskow dan Leningrad (Saint Petersburg). Indonesia percaya penuh atas bantuan Rusia ini, begitu pula Rusia. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah berkembang pesat dan ini berkat kerja sama militer Indonesia-Uni Soviet yang berpengaruh secara signifikan. (http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=7006&coid=4&caid=33&gid=2, diakses 9 maret 2017).

Dalam sejarah militer Indonesia tahun 1961 memiliki masa-masa kejayaan. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan, khususnya di Asia Tenggara. Selain pesawat-pesawat bekas berbagai jenis peninggalan Belanda dan Jepang yang jumlahnya tidak kurang dari 300 pesawat, kekuatan AURI juga terus bertambah dengan adanya kontrak pembelian persenjataan militer senilai USD 2,5 miliar dari Rusia dan Polandia dengan persyaratan pembayaran jangka panjang yang tidak terlalu memberatkan Indonesia. Skuadron-skuadron udara baru pun mulai bermunculan seiring datangnya beratus-ratus pesawat udara baru berbagai jenis dan fungsi serta peralatan militer lainnya dari Rusia dan Polandia, antara lain 41 Helikopter MI-4 (angkutan ringan), 9 Helikopter MI-6 (angkutan berat), 30 pesawat latih Jet MIG-15 UTI, 49 pesawat baru sergap MIG-17, 10 pesawat buru sergap MIG-19 dan 2 pesawat buru sergap supersonic MIG-21 (http://tni.mil.id/view-2473-kisah-heroik-merebut-irian-barat-1.html, diakses 9

Maret 2017) Dalam hal ini bisa dikatakan Uni Soviet (sekarang Rusia) sangat berpengaruh dalam membantu membangun kemandirian industri pertahanan Indonesia. Selain itu juga Rusia juga berperan penting dalam memperebutkan Irian Barat.

Pada 1966–1967, ketika kondisi politik di Indonesia yang berada dalam kekuasaan Orde Baru berubah drastis, namun hubungan kedua negara masih tetap terjaga. Kedua negara sadar akan perbedaan ideologinya, akan tetapi tetap menjaga hubungan dalam batas-batas yang wajar. Selama 30 tahun kekuasaan Orde Baru, yang berakhir pada 1998 lalu, hubungan kedua negara masih tetap terjaga. Dan sekarang kedua negara memasuki tahapan baru hubungan yang didasarkan pada saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. (http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=7006&coid=4&caid=33&gid=2, diakses 9 maret 2017)

Ideologi suatu negara sudah dapat diketahui ketika hubungan antar negara itu semakin erat atau semakin merenggang. Seperti halnya hubungan antara Republik Indonesia dan Uni soviet (sekarang Rusia) terjadinya pasang surut. pada masa pemerintahan Ir. Soekarno, Indonesia begitu dekat dengan Uni Soviet sehingga distilahkan hubungan itu dengan nama “Poros Jakarta-Moskow”, walaupun pada saat itu dikembangkan Gerakan Non-Blok, terlihatlah suatu ideologi dari pemerintah pada saat itu yaitu dekat dengan ideologi sosialis dan ideologi komunis dan menjauhi ideologi liberal. Lain pula pada zaman Presiden Republik Indonesia Soeharto pada saat itu beliau menjauhi Moskow dan mendekat dengan ke Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Sehingga dapat di

lihat Beliau merubah arah ideologinya kepentingan ekonomi yang lebih ditekan (Supriyatno, 2014 : 137).

Dalam sejarah militer Indonesia tidak lepas dari yang namanya embargo militer. Indonesia pernah mengalami masa yang suram ketika diembargo militer oleh Amerika serikat dan sekutunya. Embargo ini menyebabkan alutsista Indonesia stagnan tidak bisa menjalani operasi militer guna menjaga kedaulatan NKRI. Embargo ketika itu dijatuhkan lantaran Amerika Serikat menuduh Indonesia melanggar hak asasi manusia dengan menembaki demonstran di Dili, Timor Timur (kini Timor Leste). Alat Utama Sistem Persenjataan Tentara Nasional Indonesia terutama setelah hampir empat belas tahun diembargo oleh sejumlah negara produsen khususnya Amerika Serikat menunjukkan kondisi yang sudah tidak layak pakai. Sudah seharusnya pemerintah meremajakan secara bertahap semua alat utama sistem senjata (alutsista) tidak layak pakai yang dapat membahayakan keselamatan prajurit. Hanya 40-50% kesiapan operasional minimum sistem persenjataan TNI saat ini diseluruh matra angkatan, persentase tersebut jauh di bawah persentase kesiapan minimal operasional TNI (http://jakartagreater.com/true-story-jilid-9/ diakses 28 Maret 2016).

Ketika itu, pesawat tempur Indonesia yang kebanyakan adalah buatan Amerika tidak bisa terbang karena tidak adanya suku cadang. Pesawat tempur F-16 Falcon hanya beberapa unit yang bisa terbang, itupun dengan mengorbankan pesawat F-16 lain untuk ‘dikanibalisasi’ untuk diambil bagiannya dan dijadikan sparepart bagi pesawat F-16 yang masih bisa terbang. Pesawat tempur lain seperti F-5 yang juga buatan Amerika juga mengalami nasib yang tidak jauh beda

(http://militerindonesia.net/read/42/Kekuatan_Militer_Indonesia_2015_di_Mata_Dunia, diakses 27 Maret 2016).

Ketika kondisi militer Indonesia sangat memprihatinkan, Inggris secara terang-terangan melarang Indonesia menggunakan Tank Scorpion dan pesawat tempur Hwak-209/109 ketika terjadi permasalahan di Aceh. Selain itu, tetangga selatan kita yang juga turut andil di balik lepasnya timor timur dari Indonesia, yaitu Australia. Negara ini juga beberapa kali melakukan pelanggaran ke wilayah Indonesia yaitu dengan mengirimkan jet tempur F-18 ke sekitar Nusa Tenggara Timur. Kemudian Pesawat Hwak-109/209 TNI AU melakukan *intercept*/penyergapan terhadap pesawat tersebut. Akhirnya pesawat tersebut pun pergi meninggalkan wilayah Indonesia. Namun, pada malam harinya pesawat F-18 kembali memasuki wilayah Indonesia dan dalam jumlah yang jauh lebih banyak serta terbang rendah diatas Bandara El Tari Kupang. Amerika sebagai tokoh utama dibalik embargo militer Indonesia juga banyak melalukan tindakan yang sepertinya melecehkan kedaulatan Indonesia. Dan salah satu yang paling terkenal adalah peristiwa Bawean yaitu ketika 3 pesawat F-18 Angkatan Laut Amerika terbang dari kapal Induk yang sedang berlayar di wilayah Indonesia. Tidak hanya terbang, ketika pesawat tersebut juga melakukan manuver yang mengganggu penerbangan sipil di Indonesia serta tidak melaporkan kegiatannya ke pihak berwenang di Indonesia. TNI AU dengan segala keterbatasannya akhirnya mengirimkan 2 pesawat F-16 B (yg merupakan pesawat latih tempur) untuk mencegat ketiga pesawat tersebut. Dari segi teknologi kedua pesawat F-16 Indonesia masih kalah dari ketiga F-18 milik Amerika tersebut

(http://analisismiliter.com/artikel/part/8/Embargo_Militer_Masa_Suram_Alutsista_Militer_Indonesia, diakses 10 Maret 2017)

Melihat lemahnya pertahanan negara, Pemerintah Indonesia pada saat itu lantas mencari cara agar keluar dari belitan embargo militer AS tersebut. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia membeli pesawat sukhoi dari Rusia yang merupakan negara kubu bersebrangan dengan AS. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia ketika itu seperti membuat dua sistem satu tergantung kepada AS dan satunya lagi kepada Rusia. Sesungguhnya embargo militer merugikan AS sendiri, dikarenakan perusahaan-perusahaan negara adidaya itu yang bergerak di industri penerbangan jadi kehilangan satu pasar potensial yaitu Indonesia, mereka tidak bisa menjual alutsista dan suku-suku cadang kepada Indonesia. Embargo akhirnya dicabut tahun 2005, namun Indonesia tetap mempertahankan dua sistem tersebut. Target Indonesia selanjutnya adalah menjaga kesinambungan alat-alat tempur yang dimiliki dalam keadaan krisis (http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160301150059-20-114600/kisah-embargo-as-dan-sukhoi-rusia-di-balik-jet-tempur-ri/, diakses 28 Maret 2016).

Pada tahun 2005 pemerintah Rusia menawarkan kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Indonesia dan Rusia sepakat untuk membentuk Komisi Kerjasama Teknik Militer (KKTM). Pembentukan KKTM ditandatangani dalam Sidang Komisi Pertama di Rusia pada tanggal 22 September 2005. Penentuan dan pelaksanaan kerjasama pertahanan militer Indonesia dengan Rusia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sangat dipengaruhi oleh kondisi

pertahanan militer negara yang mencakup perkembangan alutsista indonesia saat ini (http://jakartagreater.com/true-story-jilid-9/, diakses pada 29 maret 2016).

Selanjutnya pada tahun 2006 tanggal 1 Desember di Moscow, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia melakukan pertemuan guna membahas kerja sama di bidang teknik-militer, terdapat beberapa perjanjian internasional yaitu, Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Bantuan dalam rangka Pelaksanaan Program Kerjasama Teknik-Militer Indonesia-Rusia Tahun (2006-2010) yang meliputi pengadaan alutsista, perbaikan dan perawatan suku cadang, pelatihan personel, pelibatan industri dalam negeri serta pemberian lisensi produk (http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty[country_id]=113&Treaty[work_type_id]=1, diakses 28 April 2016). Ini merupakan salah satu upaya TNI untuk terus memodernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang dimilikinya, untuh memenuhi keseluruhan kebutuhan alutsista TNI.

Pada tanggal 6 September 2007, Presiden Vladimir Putin mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Vladimir Putin ingin mengkaji ulang hubungan kerja sama teknik militer yang telah terjalin sejak tahun 2003. Rusia memberikan penawaran *State Credit* (kredit negara) sebesar 1 Milyar Dollar AS dari Pemerintah Rusia memiliki periode selama 5 tahun (2006-2010) yang nantinya diambil dari *State Credit* yang sudah disepakati Pemerintah Indonesia untuk keseluruhan kebutuhan alutsista TNI sebesar 3,7 Milyar Dollar AS sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Jadi total *State Credit* sebesar 3,7 Milyar Dollar yang akan diperuntukan

untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan alutsista TNI periode tersebut. Teknis dari proses pembelian alutsista akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun pertahun, sehingga dapat diperkirakan sekitar 250-300 Juta Dollar per tahunnya akan diambil dari *State Credit* 1 Milyar Dollar AS selama jangka waktu 5 tahun. Untuk pembayaran tahun pertama sekitar 220 Juta Dollar AS, uang mukanya akan dibayarkan Menteri Keuangan sebesar 16,4 Juta Dollar dan dilaksanakan tahun 2007, tergantung pencairan APBN (http://jakartagreater.com/true-story-jilid-9/ diakses pada tanggal 29 Februari 2016).

Penawaran dari *state credit* ini sangat memuaskan dimana Indonesia mendapatkan beberapa alutsista yang cukup kuat dan berpengaruh dalam menjaga kedaulatan NKRI. Alutsista yang didapatkan Indonesia pada tahun 2007, berupa 6 unit pesawat tempur Sukhoi yang terdiri dari 3 Su-27 SKM dan 3 Su-30 MK2 (http://alutsista.net/read/13/Daftar_Alutsista_Pesawat_Tempur_Indonesia_Part_1, diakses 28 Februari 2015). Selanjutnya, pada tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia membeli helikopter Mi 17-V5. Namun, Mi-17 bukan heli serbu seperti kembarannya, yakni heli Mi-35 yang juga dimiliki AD. Sebagai kendaraan angkut personel, heli tersebut mampu menampung 28 personel ditambah *feature* anti-peluru (http://www.merdeka.com/peristiwa/canggihnya-heli-mi-17-alutsista-andalan-tni-ad-di-medan-tempur.html, diakses pada tanggal 28 April 2016).

Pada bulan November 2010, sebanyak 17 unit tank amphibi BMP-3F digunakan oleh Korps Marinir TNI AL. Pengiriman ini dilaksanakan dalam lingkup pemberian kredit kepada Indonesia oleh Rusia sebesar 1 miliar dollar AS, yang ditandatangani Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kunjungannya ke

Jakarta September 2007 lalu. Pemerintah kemudian Indonesia kembali menandatangani kontrak pembelian 37 unit BMP-3F bernilai 114 juta dolar AS yang diperuntukkan bagi marinir Indonesia pada bulan Mei 2013. Pada bulan Januari 2014, kelompok pengiriman kedua BMP-3F secara resmi diserahkan kepada TNI Indonesia sehingga total BMP-3F yang dimiliki TNI adalah sebanyak 54 unit. Pada bulan November 2014 lalu, Direktur Rosoboronexport bidang penugasan khusus Nikolay Dimidyuk menyebutkan, perusahaannya berencana kembali mengirim sekitar 50 unit BMP-3F ke Indonesia (http://indonesia.rbth.com/news/2015/03/18/siap_tanda_tangan_kontrak_baru_rosoboronexport_berencana_kirim_50_unit_b_27133, diakses 1 Maret 2016).

Tabel 1.1
Program Kerjasama Teknik Militer
Indonesia-Rusia Tahun 2006-2010

No	PENGGUNA/ PERALATAN DAN SUKU CADANG	UNIT	JML	TAHUN				
				2006	2007	2008	2009	2010
A	**Angkatan Darat**							
1.	Mi-17-V5 *Transport Helicopter*	Unit	10		3	4	3	
2.	*Additional equipment for* Mi-17-V5 *helicopter*	Paket	1		1			
B.	**Angkatan Laut**							
1.	BMP-*3F Combat InfantryVehicle* (*Amphibious Tank*)	Unit	20		4	6	5	5
C.	**Angkatan Udara**							
1.	Su-27SKM Sukhoi *Multyrole Fighter Aircraft*	Unit	3	3				
2	Su-30-MK2 Sukhoi *Multyrole Fighter Aircraft*	Unit	3	3				

Sumber : Data di olah peneliti dari MoU

Program kerja sama di bidang teknik militer pada kurun waktu 2006-2010 yang dilakukan dengan Rusia berupa pengadaan alutsista buatan Rusia kepada Indonesia, yaitu pesawat tempur, helikopter dan tank amphibi. Kerjasama dengan Rusia merupakan salah satu cara Indonesia untuk modernisasi alutsista Indonesia guna menjaga keutuhan dari NKRI. kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan pemerintah Federasi Rusia di bidang teknik militer diharapkan menjadi model kerjasama militer selanjutnya bagi kedua negara. Pengadaan alutsista di Indonesia akan dilakukan secara berjenjang melalui Pengamatan dilakukan angkatan TNI, pengajuan dilakukan Mabes TNI dan keputusan diambil Kementerian Pertahanan serta DPR RI. Rusia dan Indonesia saling membutuhkan satu sama lain dengan tujuan yang sama, perdamaian dunia, keamanan dan kemakmuran.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, wilayah yang luas baik darat maupun lautan memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga keutuhan dan persatuan serta kesatuan wilayahnya. Berbagai ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dapat mengancam keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu Indonesia perlu modernisasi alutsista untuk menjaga kedaulatan wilayah yang secara garis besar terdiri dari pulau-pulau dan dengan dikelilingi oleh lautan yang luas. Namun demikian, kedaulatan, kemerdekaan dan keutuhan wilayah juga merupakan kepentingan nasional yang sangat penting.

Kekuatan militer merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas negara. Semua negara termasuk Indonesia membangun

kekuatan militernya untuk menjaga keamanan nasional sekaligus memenuhi kepentingan nasional. Pertahanan keamanan nasional yang mumpuni sangat dibutuhkan oleh negara kepulauan seperti Indonesia.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara bukan semata-mata ditujukan untuk perang. Berbagai operasi militer selain perang (OMSP) juga merupakan bagian pertahanan negara. Bagi bangsa Indonesia, hakikat pertahanan negara merupakan segala upaya pertahanan semesta, yang penyelenggaraannya didasari kesadaran akan hak dan kewajiban semua warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat (Karim, 2014 : 7).

Terkait dengan modernisasi kualitas alutsista Indonesia, Rusia menjadi salah satu negara yang tepat untuk menjalin kerjasama. Rusia merupakan negara dengan tradisi militer yang kuat dan menjadi salah satu kekuatan utama militer dunia saat ini. Bagi Indonesia kerja sama dalam bidang teknik militer yang dianggap paling signifikan bersama Rusia, dikarenakan Kebutuhan modernisasi alutsista Indonesia saat ini menuntut Indonesia untuk mencari strategi yang baru. Melalui kerjasama teknik militer dengan Rusia, pemerintah Indonesia ingin mengembalikan kemampuan militernya yang stagnan akibat imbas embargo militer dari Amerika Serikat serta membangun kemandirian teknologi militer.

Penelitian-penelitian mengenai kerjasama Indonesia-Rusia salah satunya adalah karya ilmiah berupa jurnal dari Rindu Faradisah Novana, yang bersangkut dengan masalah yang di ambil yang berjudul *Kerjasama Indonesia Dengan Rusia Dalam Bidang Pertahanan Militer Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004-2009*, yang dibuat pada tahun 2012 jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.

Dalam karya tulis berupa jurnal tersebut yang bersangkutan dengan masalah menganalisis fokus pertahanan militer kerjasama selama Susilo Bambang Yudhoyono periode (2004-2009) adalah untuk memperbaharui dan meningkatkan kondisi dan fungsi alat utama sistem senjata tentara Indonesia.

Persamaan dengan penelitian Rindu, sama-sama membahas kerjasama Indonesia dan Rusia menyangkut memperbaharui alutsista, membicarakan awal hubungan Kerjasama Indonesia dan Rusia, membicarakan menyusutnya hubungan Indonesia-Rusia dan terbukanya kembali hubungan kerjasama Indonesia dan Rusia.

Perbedaan penelitian Rindu dengan penelitian ini ialah, penelitian Rindu hanya terfokus kerjasama bilateral Indonesia-Rusia dalam bidang pertahanan militer (2004-2009), dimana dalam karya tulisnya membahas pada masa embargo militer yang diterapkan Amerika Serikat kepada Indonesia. Melihat dari kesimpulan peneliti Rindu secara garis besar dia membandingkan keuntungan dan kerugian berkerjasama teknik militer antara Rusia dan Amerika Serikat. Dalam kesimpulan peneliti Rindu juga secara singkat berbicara mengenai pengadaan alutsista yang sudah terealisasi, berupa pesawat tempur sukhoi Su-27SKM dan

Su-30MK2. Dalam kesimpulannya peneliti Rindu mengatakan pengadaan alutsista yang belum terealisasi berupa Tank Amphibi BMP-3F dan kapal selam kilo class.

Sedangkan peneliti akan membahas lebih spesifik dan fokus lebih jelasnya Kerjasama Indonesia-Rusia di bidang teknik-militer melalui dari lahirnya Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Bantuan dalam rangka Pelaksanaan Program Kerjasama Teknik-Militer Indonesia-Rusia di Moscow 1 Desember 2006, berupa pengadaan alutsista helikopter MI 17V5, pesawat tempur sukhoi 27SKM dan 30MK2 dan Tank Amphibi BMP3-F serta alat perlengkapan persemjataannya. Peneliti membahas modernisasi alutsista dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Terkait dengan fenomena yang akan peneliti bahas pada tahun 2006 kondisi alutsista Indonesia perlu dimodernisasi disemua matra angkatan TNI. Alutsista Indonesia tidak bisa melakukan operasi militer secara maksimal, dikarenakan imbas dari embargo Amerika Serikat yang berlangsung kurang lebih 14 tahun dari tahun 1991, buntut dari kasus HAM yang terjadi di Timor Timor saat itu (Timor Leste).

Penelitian lainnya yang membahas tentang *Pengaruh Kerjasama Militer Indonesia - Rusia Terhadap perkembangan kekuatan TNI-AU (2003-2010)*, yang ditulis Oleh Trya Wibawa, merupakan lulusan Hubungan International UNIKOM (Universitas Komputer Indonesia).

Persamaannya Triya dengan peneliti sama-sama membahas alutsista berupa pesawat sukhoi untuk memeperkuat TNI AU, dimana pada tahun 2007

pemerintah Indonesia melakukan pembelian 6 unit pesawat tempur sukhoi diantaranya, 3 pesawat tempur Su-27 SKM dan 3 unit Su-30 MK2.

Perbedaan penelitian Triya Wibawa merupakan jangkaun waktu yang dibahasnya, judul dari skripsinya *Pengaruh Kerjasama Militer Indonesia - Rusia Terhadap perkembangan kekuatan TNI-AU (2003-2010)*, Triya wibawa lebih membicarakan pengaruh dan perkembangan kekuatan Angkatan Udara (AU). Sedangkan peneliti akan membahas *Kerjasama Indonesia-Rusia Di Bidang Teknik-Militer Dalam Modernisasi Alutsista Indonesia* (2006-2010), Peneliti membahas modrenisasi alutsista dari TNI AD, AU, AL, dari lahirnya, Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Bantuan dalam rangka Pelaksanaan Program Kerjasama Teknik-Militer Indonesia-Rusia di Moscow 1 Desember 2006. Peneliti juga ingin melanjutkan penelitian dari Triya Wibawa dan melengkapi penelitian.

Penelitian lainnya yang membahas tentang Kerjasama Indonesia dan Rusia dalam Bidang perdagangan alutsista 2003, merupakan sebuah skripsi yang ditulis oleh Subhan Jamil Badhowi, Universitas Islam Negeri (UIN) tahun 2014. Peneliti ini hanya membahas permasalan seputar kerjasama antara Indonesia dan Rusia di bidang perdagangan alutsista pada tahun 2003 dan Penelitian Subhan membahas proses terjalinya kerjasama antara Indonesia dan Rusia di bidang perdagangan alutsista, hingga berbagai macam hal yang menjadi latar belakang kerjasama tersebut. Dalam kesimpulannya Subhan menceritakan kondisi alutsista sangat memprihatinkan, didasarkan embargo yang diterapkan oleh Amerika Serikat

kepada Indonesia memicu krisis di tubuh militer Indonesia, hal tersebut karena Indonesia memang saat itu ketergantungan yang besar terhadap Amerika Serikat.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul: "***Kerjasama Indonesia-Rusia Di Bidang Teknik Militer Dalam Modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) Indonesia (2006-2010)"***.

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah yang telah dipelajari oleh peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, antara lain:

1. Politik Luar Negeri RI

   Dalam mata kuliah ini mempelajari mengenai Politik luar negeri yang dijalankan oleh setiap negara pada dasarnya merupakan suatu komitmen berupa strategi dasar dalam mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya. Politik luar negeri juga menjadi cerminan dari keinginan dan aspirasi seluruh rakyat suatu negara yang harus diperjuangkan pemerintahnya di luar negeri.

2. Hubungan Internasional di kawasan Eropa

   Hubungan Internasional di Kawasan Eropa, membahas tentang fenomena-fenomena hubungan internasional yang terjadi di Eropa, sejarah-sejarah munculnya politik luar negri negara-negara di Eropa termasuk Rusia.

3. Diplomasi dan Negosiasi

   Mata kuliah ini membahas tentang tingkah laku negara dalam mencapai kepentingannya melalui macam-macam bentuk, teknik, dan strategi dalam berdiplomasi dan bernegosiasi antar aktor hubungan internasional dalam lingkup ilmu hubungan internasional. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Rusia berusaha mencapai kepentingan nasionalnya melalui kerjasama teknik militer melalui Mou Bantuan dalam rangka pelaksanaan kerjasama teknik militer (2006-2010).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarksan dari latar belakang di atas masalah dari penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana kerjasama Indonesia-Rusia dalam bidang teknik-militer yang telah dilaksanakan untuk modernisasi alutsista Indonesia?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa kepentingan pemerintah Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam bidang teknik-militer dengan Rusia (2006-2010) ?
2. Keuntungan apa saja yang didapatkan oleh Pemerintah Indonesia melalui kerjasama di bidang teknik militer dengan Rusia (2006-2010) ?
3. Kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kerjasama teknik militer dengan Pemerintah Federasi Rusia dalam modernisasi alutsista Indonesia (2006-2010) ?

4. Bagaimana prospek kedepannya kerjasama teknik militer Indonesia-Rusia dalam modernisasi alutsista Indonesia ?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Luasnya ruang lingkup masalah kerjasama antara Indonesia-Rusia, mendorong peneliti untuk memberikan batasan masalah agar lebih fokus dan terarah. Penelitian ini akan dibatasi dengan mempelajari kerjasama Indonesia dan Rusia dibidang teknik-militer dari tahun 2006 sampai 2010, yaitu mengambil momentum lahirnya MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang bantuan dalam rangka pelaksanaan program kerjasama teknik militer (2006-2010).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud ingin mengetahui langkah apa saja yang dilakukan Indonesia dan Rusia dalam kerangka kerjasama teknik militer untuk modernisasi alutsista Indonesia pada tahun 2006 sampai 2010.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa kepentingan apa Pemerintah Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam bidang teknik-militer dengan Rusia (2006-2010).
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa keuntungan apa saja yang didapatkan oleh Pemerintah Indonesia, melalui kerjasama di bidang teknik militer dengan Pemerintah Federasi Rusia.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa kendala apa saja yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kerjasama teknik

militer dengan Pemerintah Federasi Rusia, dalam modernisasi alutsista Indonesia.

4. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa prospek kedepannya kerjasama teknik militer Indonesia-Rusia dalam modernisasi alutsista Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dibagi menjadi dua :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber atau referensi pengetahuan terkait perkembangan kerjasama Indonesia dan Rusia dalam bidang teknik militer serta dapat menambah keilmuan mengenai mengenai tantangan berdiplomasi dan negosiasi dan studi strategis tentang langkah-langkah yang dapat dilaksanakan oleh negara-negara untuk berdiplomasi dalam hal kerjasama bilateral.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Bagi lembaga akedemik untuk bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional dan umum.